

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
 NOMOR 10/PMK.05/2011 TENTANG PENYUSUNAN  
 DAN PELAKSANAAN DAFTAR ISIAN  
 PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN  
 PROGRAM/KEGIATAN NASIONAL PEMBERDAYAAN  
 MASYARAKAT MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2010  
 SEBAGAI ANGGARAN BELANJA TAMBAHAN  
 TAHUN ANGGARAN 2011

### BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor:

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun..... telah diselenggarakan rekonsiliasi realisasi anggaran antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja ..... kode (.....), dengan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)..... kode (.....).

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama dengan melakukan proses pencocokan data realisasi Bantuan Langsung Masyarakat Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Tahun Anggaran 2010 dengan hasil sebagaimana terlampir yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini.

Laporan hasil rekonsiliasi ini menjadi dasar penyusunan dan pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Tahun Anggaran 2010.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

Kepala KPPN.....

KPA Satuan Kerja .....

\_\_\_\_\_  
NIP

\_\_\_\_\_  
NIP

**LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI SISA DANA PROGRAM/KEGIATAN NASIONAL PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2010  
(DALAM RIBUAN RUPIAH)**

Nomor SP : aaaa/bbb-cc.d/ee/ffff (1)  
Kode dan Nama Satker : (999999) XXXXXXXXXXXXXXXX (2)

No.	Kode	Uraian Kegiatan, Sub Kegiatan, Kel. Akun	BELANJA BANTUAN SOSIAL			Sumber Dana	Keterangan
			PAGU	REALISASI	SISA		
1	2	3	5	6	7	8	9
XX (3)	(4) XX.XX.XX.XXXX	YYYYYYYYYYYYYYYY (7)	999,999	999,999	999,999	XX (10)	
	(5) XXXX.XXXX	YYYYYYYYYYYYYYYY (8)	999,999	999,999	999,999		
	(6) XXXX	YYYYYYYYYYYYYYYY (9)	999,999	999,999	999,999		
		JUMLAH	999,999	999,999	999,999		

KEPALA KPPN .....

..... 2011 (11)  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
SATUAN KERJA .....

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (12)  
NIP. YYYYYYYYYYYYYYY (13)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (14)  
NIP. YYYYYYYYYYYYYYY (15)

**CARA PENGISIAN  
LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI SISA DANA  
PROGRAM/KEGIATAN NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI  
TAHUN ANGGARAN 2010**

Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi Sisa Dana Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2010 berisi informasi mengenai pagu, realisasi dan sisa dana kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2010 dengan cara pengisian sebagai berikut :

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan Nomor SP DIPA
(2)	Diisi dengan Kode Satker dan uraian Satker
(3)	Diisi dengan Nomor Urut
(4)	Diisi dengan Kode Fungsi, Sub Fungsi, Program dan Kegiatan
(5)	Diisi dengan Kode Sub Kegiatan
(6)	Diisi dengan Kode BKPK / Kelompok Akun
(7)	Diisi dengan Uraian Kegiatan
(8)	Diisi dengan Uraian Sub Kegiatan
(9)	Diisi dengan Uraian
(10)	Diisi dengan Kode Sumber Dana
(11)	Diisi dengan Kota dan Tanggal
(12)	Diisi dengan Nama Kepala KPPN
(13)	Diisi dengan NIP Kepala KPPN
(14)	Diisi dengan Nama Pejabat Penanda Tangan (Kepala Satker/KPA)
(15)	Diisi dengan NIP Pejabat Penanda Tangan (Kepala Satker/KPA)

---

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 10/PMK.05/2011 TENTANG  
PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN LANJUTAN  
PROGRAM/KEGIATAN NASIONAL  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2010  
SEBAGAI ANGGARAN BELANJA  
TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2011

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN  
TAHUN ANGGARAN 2011  
NOMOR : aaaa/bbb-cc.d ee/ff/2011 (1)  
RINCIAN PENGELUARAN  
(RIBUAN RUPIAH)

Kementerian Negara/Lembaga : (XXX)  
Unit Organisasi : (XX)  
Provinsi : (XX)  
Kode/Nomor Sektor Kewenangan : (XXXXXX)  
Kewenangan : (XX)  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (2)  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (3)  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (4)  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (5)  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (6)

Kode	Urutan Saluran Anggaran/Output/Sumbu Data	BELANJA					Jumlah SP/URUH	ICDASIS KPPN	Cara Penarikan Register
		NEGAWA	BARANG	MODAL	DANJUAN SOSIAL	LAIN-LAIN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XXXXXX (1)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (1)	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999		
XXX.XX.XX (5)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (10)	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999		
XXXX (1-7)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (12)	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	XX.XX	
XXXX.XX (14)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (11)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (11)	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	111	
XX (1-6)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (17)	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	XXXX (1-8)	XX XXXXXXXXX ;13; (20)
		999.999.999.999	999.999.999.999	(21) (22)	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999		
						999.999.999.999	999.999.999.999	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX (24)	
								A.A. KETERANGAN	24
								ALF	25
									26
									27

**CARA PENGISIAN  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN  
TAHUN ANGGARAN 2010**

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Tahun Anggaran 2010 berisi informasi untuk masing-masing Satuan Kerja baik sasaran yang hendak dicapai maupun alokasi dana pada masing-masing jenis belanja dan akun dengan cara pengisian sebagai berikut:

No.	Uraian Isian
[1]	Diisi dengan Nomor SP DIPA
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga
[3]	Diisi dengan kode Unit Organisasi dan uraian nama Unit Organisasi
[4]	Diisi dengan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi
[5]	Diisi dengan kode satker diikuti dengan uraian satker
[6]	Diisi dengan kode kewenangan dan uraian kewenangan
[7]	Diisi dengan kode satker
[8]	Diisi dengan uraian satker
[9]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan program
[10]	Diisi dengan uraian program
[11]	Diisi dengan kode kegiatan
[12]	Diisi dengan uraian kegiatan
[13]	Diisi dengan xx pertama = kode provinsi, xx kedua = kode kabupaten/kota
[14]	Diisi dengan kode kegiatan dan kode output
[15]	Diisi dengan uraian output
[16]	Diisi dengan kode sumber dana
[17]	Diisi dengan uraian sumber dana
[18]	Diisi dengan kode kantor bayar (KPPN)
[19]	Diisi dengan cara penarikan (PL,RK,LC,PP)
[20]	Diisi dengan nomor register untuk PHLN
[21]	Diisi dengan pagu per jenis belanja (pegawai, barang, modal, bantuan sosial, dan lain-lain) dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah
[22]	Diisi dengan total pagu per jenis belanja (pegawai, barang, modal, bantuan sosial, dan lain-lain) dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah
[23]	Diisi dengan tempat dan tanggal penetapan DIPA
[24]	Diisi uraian kementerian
[25]	Diisi dengan jabatan penandatangan DIPA (PA/KPA)
[26]	Diisi dengan nama pejabat penandatangan DIPA
[27]	Diisi dengan NIP pejabat penandatangan DIPA

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
 NOMOR 10/PMK.05/2011 TENTANG  
 PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN  
 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN LANJUTAN  
 PROGRAM/KEGIATAN NASIONAL  
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
 MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2010  
 SEBAGAI ANGGARAN BELANJA  
 TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2011

KOP SURAT ..... (1)

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ..... (2)

NIP : ..... (3)

Jabatan : Kuasa PA Satuan Kerja ..... (4)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN ..... (5), terdapat sisa dana Bantuan Langsung Masyarakat Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor .....(6) Satuan Kerja ..... (7) sebesar Rp.....(8);
2. Berdasarkan sisa dana tersebut pada angka 1 di atas, diajukan sebagai pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. ....(9);
3. Sisa dana sebesar Rp.....(10) tidak diajukan sebagai pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Tahun Anggaran 2010 karena .....(11).

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....(12),.....(13)

KPA Satuan Kerja..... (14)

(tanda tangan)

..... (15)

NIP. .... (16)

## CARA PENGISIAN SURAT PERNYATAAN

No.	Uraian Isian
(1)	Sesuai kop surat Satuan Kerja yang bersangkutan
(2)	Diisi nama pejabat penandatangan surat
(3)	Diisi NIP pejabat penandatangan surat
(4)	Diisi nama Satuan Kerja yang bersangkutan
(5)	Diisi nama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pembayar
(6)	Diisi nomor Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010
(7)	Diisi nama Satuan Kerja
(8)	Diisi nilai uang sisa dana (yang belum direalisasikan) berdasarkan rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(9)	Diisi nilai uang sisa dana yang akan diajukan sebagai pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Tahun Anggaran 2010
(10)	Diisi nilai uang sisa dana yang tidak diajukan sebagai pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Tahun Anggaran 2010 [(8) – (9)]
(11)	Diisi alasan tidak diajukan sebagai pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Tahun Anggaran 2010
(12)	Diisi lokasi/tempat penanda tangan surat
(13)	Diisi tanggal bulan dan tahun penanda tangan surat
(14)	Diisi nama Satuan Kerja
(15)	Diisi nama penanggung jawab surat
(16)	Diisi nama NIP penanggung jawab surat

---

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 10/PMK.05/2011 TENTANG  
PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN LANJUTAN  
PROGRAM/KEGIATAN NASIONAL  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2010  
SEBAGAI ANGGARAN BELANJA  
TAMBAHANTAHUN ANGGARAN 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN : SATU SET DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN  
TAHUN ANGGARAN 2011  
NOMOR : aaaa/bbb-cc.d.eeff/2011 (1)**

**A. Dasar :**

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No 10 Tahun 2010 tentang APBN TA 2011 dan perubahannya

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran :**

1. Kementerian Negara/ Lembaga : (XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (2)
2. Unit Organisasi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (3)
3. Provinsi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (4)
4. Kode/Nama Satker : (XXXXXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (5)

Sebesar : Rp. 999.999.999.999 (\*\*-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX\*) (6)

**Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :**

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX (7)  
XX.XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX (8)

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

XXX.XX.XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX (9)  
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX (10)

Rp 999.999.999.999 (11)  
Rp 999.999.999.999 }  
Rp 999.999.999.999

**C. Sumber Dana Berasal :**

1. Rupiah Murni
2. PNBP
- PNBP Biasa
- Penerimaan Saldo Awal BLU
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri
- Pinjaman Luar Negeri
- Hibah Luar Negeri

Rp. 999.999.999.999 (18)  
Rp. 999.999.999.999 (19)  
Rp. 999.999.999.999 (20)

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri
- Pinjaman Dalam Negeri
- Hibah Dalam Negeri
5. Penerimaan Pembayaan BLU

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (21)
2. (XXX) (22) Rp. 999.999.999.999 (23)
- 6.
- 7.

**E. Surat Pengesahan ini berlaku sebagai dasar pencairan/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.**

Tanggung jawab terhadap penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Setiap pejabat dilarang melakukan pengeluaran yang berakibat pengeluaran atas beban APBN jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

**F. DIPA ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 30 April 2011.**

XXXXXXXXXX xx XXXXXXXXXXXXXXXX XXX (24)  
A.N. MENTERI KEUANGAN RI  
KEPALA KANWIL DIJEN PBN PROVINSI  
XXXXXXXXXXXXX (25)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (26)  
NIP. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (27)



**CARA PENGISIAN SURAT PENGESAHAN  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN  
TAHUN ANGGARAN 2010**

Halaman ini berisi informasi mengenai hal-hal yang disahkan dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Tahun Anggaran 2010. Cara pengisian Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut:

No.	Uraian Isian	
[1]	Diisi dengan nomor SP DIPA dengan ketentuan sebagai berikut:	
	aaaa	Nomor SP
	bbb-cc	kode Kementerian Negara/Lembaga - kode Unit Organisasi
	d	kode kewenangan (1=KP; 2=KD; 3=DK; 4=TP; 5=UB; 6=DS)
	ee	Jenis DIPA (20= Lanjutan)
	ff	Diisi dengan kode pengesahan DIPA oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan (01 dst=Kanwil DJPBN).
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga	
[3]	Diisi dengan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi	
[4]	Diisi dengan kode lokasi provinsi diikuti dengan uraian provinsi	
[5]	Diisi dengan kode satker diikuti dengan uraian nama satker	
[6]	Diisi dengan jumlah pagu keseluruhan DIPA dengan angka dan huruf	
[7]	Diisi dengan kode fungsi diikuti dengan uraian fungsi	
[8]	Diisi dengan kode sub fungsi diikuti dengan uraian sub fungsi	
[9]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan program diikuti dengan uraian program	
[10]	Diisi dengan kode kegiatan diikuti dengan uraian kegiatan	
[11]	Diisi dengan jumlah pagu untuk program dan kegiatan	
[12]	Diisi dengan jumlah pagu Rupiah Murni (RM)	
[13]	Diisi dengan jumlah Total pagu PNBPN (Tidak perlu diisi)	
[14]	Diisi dengan jumlah pagu PNBPN (Tidak perlu diisi)	
[15]	Diisi dengan jumlah pagu Penerimaan yang berasal dari Saldo Awal BLU (Tidak perlu diisi)	
[16]	Diisi dengan jumlah pagu Pinjaman Luar Negeri	
[17]	Diisi dengan jumlah pagu Hibah Luar Negeri	
[18]	Diisi dengan jumlah pagu Pinjaman Dalam Negeri	
[19]	Diisi dengan jumlah pagu Hibah Dalam Negeri	
[20]	Diisi dengan jumlah pagu Penerimaan Pembiayaan BLU (Tidak perlu diisi)	
[21]	Diisi dengan nama KPPN	
[22]	Diisi dengan kode KPPN	
[23]	Diisi dengan jumlah uang untuk KPPN terkait.	
[24]	Diisi tempat dan tanggal penetapan Surat Pengesahan DIPA	
[25]	Diisi dengan nama Kanwil DJPBN	
[26]	Diisi dengan nama penandatangan SP DIPA	
[27]	Diisi dengan NIP penandatangan SP DIPA	

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
 UNIT ORGANISASI : (033.05) DITJEN CIPTA KARYA

SEMULA (STRUKTUR ANGGARAN TA 2010)		MENJADI (STRUKTUR ANGGARAN TA 2011)		
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ JENIS BELANJA	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	KET.
06.02.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN	033.05.07	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program
9303	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH	2412	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman	Kegiatan
04928	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH (RISE)	2412.08	Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi dan Sosial (RISE)	Output
573119	Belanja Lembaga Sosial Lainnya	011	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Komponen
		573119	Belanja Lembaga Sosial Lainnya	akun
06.90.07	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA PERDESAAN	033.05.07	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program
4312	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	2412	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman	Kegiatan
01032	BANTUAN SARANA DAN PRASARANA	2412.09	Infrastruktur Perdesaan (PIPP)	Output
573119	Belanja Lembaga Sosial Lainnya	011	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Komponen
		573119	Belanja Lembaga Sosial Lainnya	akun

06.02.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN	033.05.07	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program
4280	PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN (P2KP)	2413	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara	Kegiatan
00081	BANTUAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	2413.07	Keswadayaan Masyarakat	Output
573119	Belanja Lembaga Sosial Lainnya	011	Bantuan Langsung Masyarakat	Komponen
		573119	Belanja Lembaga Sosial Lainnya	Akun

## Catatan :

1. Indikator Kinerja Utama Program sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Program TA 2011;
2. Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan Indikator Kinerja Kegiatan I/A 2011;
3. Volume Output disesuaikan dengan banyaknya kuantitas Output yang dilanjutkan;
4. Untuk Sub Output dan Sub Komponen tidak harus ada (Opsional);
5. Detail belanja disesuaikan dengan detail belanja yang dilanjutkan.

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

**PEMETAAN DAN KONVERSI STRUKTUR ANGGARAN**  
**DAFTAR ISI/AN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN TAHUN ANGGARAN 2010**  
**PROGRAM/KEGIATAN NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI**

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
 UNIT ORGANISASI : (010.05) DITJEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SEMULA (STRUKTUR ANGGARAN TA 2010)			MENJADI (STRUKTUR ANGGARAN TA 2011)		
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ JENIS BELANJA		KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	KET.
06.90.09	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN		010.05.13	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Program
0847	PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PNPM PERDESAAN DENGAN KECAMATAN		1245	Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM)	Kegiatan
00517	BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT		1245.03	Cakupan PNPM Mandiri Perdesaan	Output
573119	Belanja Lembaga Sosial Lainnya		014	Pemberian Dana Bantuan Langsung Masyarakat	Komponen
			573119	Belanja Lembaga Sosial Lainnya	akun

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : (067) KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
 UNIT ORGANISASI : (067.01) KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

SEMULA (STRUKTUR ANGGARAN TA 2010)			MENJADI (STRUKTUR ANGGARAN TA 2011)		
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ JENIS BELANJA		KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	KET.
06.90.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TERTINGGAL		067.01.06	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Program
6257	PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS (P2DTK)		3288	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitas Penguatan Kelangkaan Pemerintahan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik	Kegiatan
00517	BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT		3288.01	Fasilitasi penguatan kelembagaan pemerintah daerah dan mengalami peningkatan indeks good governance	Output
573119	Belanja Lembaga Sosial Lainnya		016	Bantuan Langsung Masyarakat Daerah Tertinggal	Komponen
			573119	Belanja Lembaga Sosial Lainnya	akun